

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 633 /AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2024

19 Desember 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
di
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan peningkatan pemahaman terkait implementasi SAKIP kepada pegawai;
- b. Melakukan evaluasi internal SAKIP kepada unit kerja;
- c. Menyusun pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja dan menyempurnakan aplikasi *e-sakip* sebagai alat untuk pemantauan pencapaian kinerja.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, antara lain :

- a. Mereviu kembali penjenjangan kinerja dengan mengacu pada Permenpan RB No.89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Melakukan perbaikan atas dokumen perencanaan meliputi perbaikan kualitas sasaran, indikator dan penetapan target.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menunjukkan bahwa nilai sebesar **62,86** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu **implementasi SAKIP sudah baik pada instansi pemerintah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	21,64	22,14
b. Pengukuran Kinerja	30	16,93	16,93
c. Pelaporan Kinerja	15	10,07	10,31
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,17	13,48
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,81	62,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2024 sebagai berikut:

1) **Perencanaan Kinerja**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen lainnya baik di tingkat Lembaga maupun unit kerja. Rumusan kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tertuang dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja secara umum telah berorientasi hasil.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya *crosscutting* antar unit kerja dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi;
- b. Terdapat rumusan sasaran strategis yang terlalu luas dan tidak fokus pada suatu kondisi tertentu dan tidak dilengkapi dengan indikator yang cukup. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada PK BPIP Tahun 2024 yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik”;
- c. Terdapat rumusan sasaran strategis pada sebagian besar unit kerja yang belum berorientasi *outcome* atau bersifat kegiatan/output. Contohnya pada PK Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi 2024 terdapat sasaran terkait “Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila” dan pada PK Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan “Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/ Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan/ Keagamaan Nonformal dan Informal”;
- d. Terdapat penjabaran kinerja yang belum berkualitas untuk menjabarkan kinerja pada level badan kepada unit kerja di bawahnya. Contohnya pada Sasaran PK BPIP “Terwujudnya penyelenggaraan tata Kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik” yang diturunkan menjadi sasaran yang sama pada PK Sestama, namun indikatornya berkurang tanpa ada penjelasan untuk mengawal indikator yang lain;
- e. Penetapan rencana aksi pada sebagian unit kerja masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama pada PK.

2) **Pengukuran Kinerja**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah melakukan upaya pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan yang telah menyusun manual indikator kinerja pada level pusat maupun unit kerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Aplikasi E-Sakip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (*apii-kinerja.bpip.go.id*) belum dimanfaatkan untuk *monitoring* dan evaluasi kinerja secara optimal. Hal ini dari rendahnya kelengkapan pengisian capaian kinerja periodik sehingga berpengaruh pada kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan strategis dalam upaya memastikan ketercapaian target pada akhir periode;
- b. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

3) **Pelaporan Kinerja**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 baik di level pusat maupun level unit kerja. Laporan kinerja tersebut juga telah menyajikan realisasi kinerja pada tahun berjalan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja pusat maupun unit kerja belum seluruhnya dipublikasikan kepada masyarakat luas sebagai bentuk akuntabilitas publik;
- b. Sebagian laporan kinerja hanya menyajikan informasi capaian program dan anggaran, belum mengungkapkan informasi secara lengkap seperti analisis ketercapaian kinerja, data pembandingan (target, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan target jangka menengah), analisis efisiensi anggaran, faktor hambatan/pendukung dan solusinya.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menyusun pedoman evaluasi internal SAKIP dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh unit kerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat unit kerja yang mendapatkan hasil evaluasi sangat baik namun terindikasi bahwa nilai yang didapatkan cenderung tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menggambarkan kelemahan dalam proses

pelaksanaan evaluasi baik dari aspek pemahaman evaluator, penjaminan mutu evaluasi, dan aspek teknis lainnya;

- b. Laporan evaluasi internal belum sepenuhnya menunjukkan temuan yang jelas serta memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP;
- c. Belum ada mekanisme *monitoring* yang optimal atas hasil evaluasi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dipahami oleh seluruh pimpinan unit kerja dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan baik;
- d. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dijadikan dasar pemberian *reward and punishment* sehingga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara keseluruhan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja yang terdapat pada PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021. Selanjutnya, pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang;
- 2) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi antar unit kerja maupun kementerian/ lembaga lain yang memiliki keterkaitan kinerja;
- 3) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maupun unit kerja dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah sesuai dengan levelnya, berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja;
- 4) Mereviu kembali rencana aksi sebagian unit kerja dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-sakip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh seluruh unit kerja untuk proses pengumpulan data dan pengukuran kinerjanya secara *real time*. Selanjutnya, mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja;

- 6) Mendorong unit kerja untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi;
- 7) Melakukan publikasi terhadap Laporan Kinerja baik pusat maupun unit kerja secara umum kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja;
- 8) Meningkatkan kualitas laporan kinerja terutama pada unit kerja dengan memastikan penyajian analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, memastikan laporan kinerja tersebut selaras dengan kinerja yang diperjanjikan;
- 9) Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap unit kerja;
- 10) Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan unit kerja;
- 11) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi riil penerapan SAKIP setiap unit kerja sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja unit kerja;
- 12) Memastikan rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat menjadi perhatian pimpinan unit kerja dan memastikan adanya proses *monitoring* untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan berjalan dengan baik;
- 13) Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga dapat menjadi penyemangat setiap unit kerja untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Government Administration and Reform (KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI) with the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "Erwan Agus Purwanto" is printed in black text.

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.